

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kelompok Tani

1. Pengertian Kelompok

Pengertian kelompok cukup bervariasi tergantung pada sudut pandang para ahli yang mendefinisikannya. Adapun sudut pandang dari beberapa ahli antara lain meliputi pandangan yang mendasarkan pada persepsi, motivasi, tujuan kelompok, organisasi kelompok, interdependensi dan interaksi.

Mayor Polak (dalam Abdul Syani, 1987:98) menguraikan tentang pengertian kelompok berdasarkan persepsi bahwa kelompok atau grup merupakan sejumlah orang yang ada dalam hubungan antara satu sama lain dan antara hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Menurut Abdul Syani (1987:102), sejumlah rangkaian atau sistem yang dapat menyebabkan kelompok dapat dikatakan berstruktur, yaitu:

1. adanya sistem dari status-status para anggotanya. Ia memiliki susunan pengurus yang merupakan suatu rangkaian yang bersifat hierarkis.
2. terdapat atau berlakunya nilai-nilai, norma-norma (kebudayaan) dalam mempertahankan kehidupan kelompoknya yang berarti bahwa keberhasilan struktur selalu diutamakan.
3. terdapat peranan-peranan sosial (*social role*) yang merupakan aspek dinamis dari struktur.

Johnson dan Johnson (dalam Sarwono, 2005:4-5) mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi melalui tatap muka (*face to face interaction*), dan masing-masing menyadari keanggotaannya dalam kelompok, masing-masing menyadari keberadaan anggota kelompok lainnya, masing-masing menyadari saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama.

Kelompok adalah individu-individu yang hidup bersama dalam satu ikatan, yang dalam satu ikatan terjadi interaksi sosial dan ikatan organisasi antar anggota masing-masing kelompok sosial (Soerjono Dirdjosisworo, 1981:47). Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan pola interaksi yang nyata dan dapat membentuk satu kesatuan (Wiraatmadja, 1973:64).

Soetarno (1994:31-34) dalam buku Psikologi Sosial mengutip hasil penelitian para ahli sosiologi dan ahli psikologi sosial yang menyatakan bahwa kelompok sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. adanya motif yang sama

Kelompok sosial terbentuk karena anggota-anggotanya mempunyai motif yang sama. Motif yang sama tersebut merupakan pengikat sehingga setiap anggota kelompok tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sesudah kelompok sosial terbentuk biasanya muncul motif baru yang memperkokoh kehidupan kelompok sehingga timbul *sense of belonging* (rasa menyatu di dalam kelompok pada tiap-tiap anggota). Rasa tersebut berpengaruh besar terhadap individu dalam kelompok itu karena memberikan tenaga moral yang tidak akan diperolehnya apabila seseorang hidup sendiri. Selain itu, seseorang yang bergabung dalam kelompok sosial maka kebutuhannya sebagai makhluk sosial dan makhluk individu akan terpenuhi.

b. adanya sikap *in-group* dan *out-group*

Sekelompok manusia yang mempunyai tugas yang sama sulitnya atau mengalami kepahitan hidup bersama pada umumnya menunjukkan tingkah laku yang khusus. Apabila orang lain di luar kelompok itu bertingkah laku seperti mereka, mereka akan menyingkirkan diri. Sikap menolak yang ditunjukkan oleh kelompok itu disebut sikap *out-group* atau sikap terhadap “orang luar”. Kelompok manusia yang dianggap sebagai *Community Development* tersebut menunjukkan pada orang luar tentang kesediaannya berkorban bersama dan kesetiakawanannya, Selanjutnya mereka menerima orang itu dalam segala kegiatan kelompok. Sikap menerima itu disebut sikap *in-group* atau terhadap “orang dalam”.

c. adanya solidaritas

Solidaritas adalah sikap kesetiakawanan antar anggota kelompok sosial. Sikap solidaritas yang tinggi dalam kelompok tergantung pada kepercayaan setiap anggota terhadap kemampuan anggota lain untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pembagian tugas dalam kelompok sesuai dengan kecakapan masing-masing anggota dan keadaan tertentu akan memberikan hasil kerja yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi sikap solidaritas antar anggota kelompok maka semakin tinggi pula *sense of belonging*.

d. adanya struktur kelompok

Struktur kelompok merupakan suatu sistem relasi antar anggota-anggota kelompok berdasarkan peranan status mereka serta sumbangan masing-masing dalam interaksi terhadap kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Wila Huky (dalam Abdul Syani, 1987:99), bahwa kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Huky secara lebih rinci menjelaskan beberapa ciri dasar suatu kelompok sebagai berikut:

1. kelompok terdiri dari paling sedikit dua orang dan dapat terus bertambah menjadi lebih dari dua.
2. kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak dianggap terbentuk karena memenuhi persyaratan jumlah.
3. komunikasi dan interaksi yang merupakan unsur pokok suatu kelompok harus bersifat timbal balik.
4. kelompok-kelompok bisa bertahan sepanjang hidup atau dalam jangka panjang tetapi juga bisa hanya dapat bertahan sementara atau jangka pendek.
6. minat dan kepentingan bersama merupakan dasar utama pembentukan kelompok.

Pembentukan kelompok dapat berdasarkan situasi yang beraneka ragam yang dalam situasi tertentu manusia dituntut untuk bersatu.

2. Pengertian Petani

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani menyebutkan bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani anggota.

Sosiologi pertanian mengamati obyeknya secara makro dan mikro. Pusat perhatian sosiologi pertanian sebagai sosiologi-mikro adalah usaha pertanian keluarga, pertanian kolektif dan sistem sosial usaha pertanian lainnya (Planck, 1993:6). Menurut Quesnay (1993:11), petani dan penggarap merupakan satu-satunya kelas produktif dalam ekonomi nasional. Menurut A.T. Mosher (dalam Sastraatmadja, 1984:53), pertanian mulai timbul pada saat manusia mulai mengendalikan tumbuhan dan hewan, selanjutnya mengaturnya

sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.

Kebudayaan masyarakat petani menurut Redfield (1985:56) adalah kebudayaan terbelah. Pertama, untuk mempertahankan dirinya, maka petani dituntut untuk melakukan suatu komunikasi secara terus-menerus dengan pemikiran komunitas lokal yang berasal dari luar. Kedua, petani mengundang pihak luar untuk mengikuti jalur interaksi yang panjang antara komunitas tersebut dengan pusat-pusat peradaban.

Prinsip-prinsip organisasi petani dibentuk untuk mempermudah anggota-anggotanya dalam mencapai sebagian yang dibutuhkan dan/atau diinginkan. Setiap anggota menginginkan dan akan berusaha agar kelompoknya dapat benar-benar efektif dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kualitas interaksi/kerjasamanya dalam memanfaatkan segala potensi yang ada pada anggota dan lingkungannya.

2. Pengertian Gapoktan

a. Definisi Gapoktan

Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Permentan No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

Kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) maupun petani-taruna (pemuda-pemudi) yang terikat

secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pimpinan seorang kontak tani. Menurut Mosher dalam Mardikanto (1993), salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kerjasama kelompok tani.

Kelompok tani (Poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerjasama dalam meningkatkan, mengembangkan produktivitas usaha tani, memanfaatkan sumberdaya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Berbagai macam peluang dan hambatan timbul dalam usaha tani sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat. Oleh karena itu diperlukan pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa kelompok tani bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Penggabungan dalam Gapoktan terutama dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi Pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja Gapoktan sedapat mungkin di wilayah administrasi desa/kecamatan (Anonimus, 2007 : 4).

b. Tujuan Gapoktan

Gapoktan dibentuk dengan tujuan

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan pelatihan dan studi banding sesuai kemampuan keuangan Gapoktan.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan tanpa kecuali yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota, secara materil

maupun non material sesuai dengan kontribusi/andil/masukan yang diberikan dalam rangka pengembangan Organisasi Gapoktan.

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha di bidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.
4. Dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, harus diketahui dan disepakati oleh rapat anggota, dengan perencanaan dan analisa yang jelas dan harus berpedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

c. Manfaat Gapoktan

Gapoktan bermanfaat untuk:

1. Memudahkan para penyuluh pertanian melakukan pembinaan untuk memfasilitasi para petani dalam mengembangkan usahanya.
2. Memudahkan para pengambil kebijakan untuk melaksanakan program-program yang akan dikembangkan.
3. Memudahkan penyuluh pertanian melakukan pemberdayaan terhadap petani. Pemberdayaan Gapoktan adalah upaya untuk menciptakan, meningkatkan kapasitas dan kemandirian Gapoktan secara partisipatif agar mereka:
 - a. mampu menemukenali permasalahan yang terkait dalam penyediaan pangan di saat menghadapi musim paceklik dan pendistribusian atau pemasaran serta pengolahan hasil produksi petani dan ;
 - b. mencari, merumuskan, dan memutuskan cara yang cepat dan tepat bagi anggotanya terhadap persoalan ketidakstabilan harga di tingkat petani, pemasaran hasil produksi petani, dan rendahnya ketersediaan pangan disaat paceklik.

d. Fungsi Gapoktan

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 menyebutkan bahwa Gapoktan yang telah tumbuh harus berfungsi, sehingga dapat menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Berfungsinya Gapoktan tidak lepas dari peran penyuluh pertanian yang bertugas di desa/kelurahan setempat.

Gapoktan mempunyai 5 (lima) fungsi, yaitu:

1. Gapoktan Berfungsi sebagai Unit Usaha Tani

Gapoktan dapat berfungsi sebagai unit usahatani apabila penyuluh pertanian yang bertugas mampu mengarahkan Gapoktan sehingga dapat menjalankan fungsinya mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- a. Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia (dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya).
- b. Menyusun rencana definitif Gapoktan dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi.
- c. Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani anggota sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan.
- d. Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani.
- e. Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang.
- f. Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
- g. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala baik di Gapoktan maupun dengan pihak lain.

2. Gapoktan Berfungsi sebagai Unit Usaha Pengolahan

Gapoktan dapat berfungsi sebagai unit usaha pengolahan apabila penyuluh pertanian berperan mengarahkan Gapoktan agar dalam melaksanakan tugasnya. mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usaha tani anggotanya;
- b. Mengembangkan kemampuan petani anggota Gapoktan dalam pengolahan produk pertanian; dan
- c. Mengorganisasikan kegiatan produksi petani anggota Gapoktan ke dalam unit usaha pengolahan hasil pertanian.

3. Gapoktan Berfungsi sebagai Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi

Gapoktan dapat berfungsi sebagai unit usaha sarana dan prasarana apabila penyuluh pertanian berperan dalam mengarahkan Gapoktan agar berkemampuan dalam menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana setiap anggotanya.

4. Gapoktan Berfungsi sebagai Unit Usaha Pemasaran

Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha pemasaran dapat dicapai apabila penyuluh pertanian berperan dalam mengarahkan Gapoktan untuk menjalankan fungsinya ai kemampuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi serta menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditas yang lebih menguntungkan.
- b. Merencanakan kebutuhan pasar dengan memperhatikan segmentasi pasar (tingkat kemampuan calon pembeli).

- c. Mengembangkan penyediaan komoditi yang dibutuhkan pasar.

5. Gapoktan Berfungsi sebagai Unit Usaha Keuangan Mikro

Gapoktan dapat berfungsi sebagai unit usaha keuangan mikro apabila penyuluh pertanian mampu mengarahkan Gapoktan agar dapat menjalankan fungsinya dalam menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan informasi dan akses permodalan yang tersedia.

e. Aktivitas Gapoktan

1. Pengertian Aktivitas

Aktivitas adalah tindakan manusia yang mengandung maksud tertentu dan memang dikehendaki oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan (Manulang, 1981:147). Glodstone(1983:191) menegaskan bahwa arti aktivitas adalah sebagai berikut :

“Aktivitas adalah usaha melalui kegiatan atau tindakan manusia terhadap apa yang dikerjakan dan hasilnya dinikmati oleh seorang yang atau sekelompok orang yang mencangkup kerja pikiran dan fisik”.

Beberapa aktivitas yang dilakukan Gapoktan yaitu :

- a. Merancang Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu rencana usaha yang disusun oleh anggota kelompok tani secara sistematis dan partisipatif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi petani/Poktan dalam mendistribusikan, memasarkan, mengolah, dan menyimpan hasil panen yang tidak dapat diselesaikan oleh petani/Poktan tersebut sehingga membutuhkan kerja sama dan dukungan dari pihak lain dalam skala yang lebih besar.

Aktivitas Gapoktan dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsi Gapoktan yaitu:

- a. Unit usaha distribusi/pemasaran milik Gapoktan adalah unit usaha yang dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat mendistribusikan atau memasarkan hasil produksi (gabah/beras/jagung) petani anggotanya dengan melakukan pembelian dan penjualan sehingga harga stabil di tingkat petani.
- b. Unit usaha pengolahan milik Gapoktan adalah unit usaha yang dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat mengolah, menggiling, mengepak, dan menyimpan gabah/ beras/ jagung hasil produksi petani anggotanya sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk petani.
- c. Unit pengelola cadangan pangan adalah unit pengelolaan cadangan pangan yang dibentuk atas keinginan, kebutuhan dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat menyimpan pangan dalam jumlah yang cukup bagi anggotanya sehingga mampu mendekatkan akses pangan sepanjang waktu khususnya saat menghadapi musim paceklik.
- d. Sentra produksi pangan (padi dan/atau jagung) adalah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang produksi pangannya didominasi oleh komoditas padi dan/atau jagung.

f. Karakteristik Kelompok Tani

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani” yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ciri Kelompok Tani

Kelompok tani memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota,
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani,
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
- d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Unsur Pengikat Kelompok Tani

Unsur-unsur pengikat kelompok tani meliputi sebagai berikut:

- a. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya.
- b. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara paraanggotanya.
- c. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya.
- d. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang kurangnya sebagian besar anggotanya.
- e. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

3. Fungsi Kelompok Tani

Kelompok tani berfungsi sebagai:

- a. Kelas belajar; Kelompok tani merupakan wadah kegiatan belajar-mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan petani semakin sejahtera.

- b. Wahana Kerjasama; Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
- c. Unit Produksi; Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

B. Tinjauan Pengentasan Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Hall dan Midgley (2009), menyatakan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi individu yang mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial (Friedmann, 1979).

Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan materinya (Oscar, dalam Suparlan, 1984). Dalam proses dinamikanya, budaya kemiskinan ini selanjutnya menjadi kondisi yang memperkuat kemiskinan itu sendiri. Keadaan tersebut di atas memberikan indikasi bahwa kemiskinan merupakan penyebab dan sekaligus dampak/Masing-masing faktor penyebab

sekaligus juga merupakan dampak untuk dan dari faktor-faktor lainnya atau penyebab sirkuler (Rajab, 1996). Sementara itu, Harris (1984) mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan karena keterbatasan faktor-faktor geografis (daerahnya terpencil atau terisolasi, dan terbatasnya prasarana dan sarana), ekologi (keadaan sumber daya tanah/lahandan air serta cuaca yang tidak mendukung), teknologi (kesederhanaan sistem teknologi untuk berproduksi), dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penghasilannya. Chambers (1983) mengemukakan bahwa sebenarnya orang-orang miskin tidaklah malas, fatalistik, boros, dungu dan bodoh, tetapi mereka sebenarnya adalah pekerja keras, cerdas dan ulet. Argumennya dilandasi bahwa mereka memiliki sifat-sifat tersebut karena untuk dapat mempertahankan hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu rantai kemiskinan.

Menurut Soekanto (2002:365) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan bukan merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang bermatra multidimensional. Suharto (2009:132) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- b. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- c. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
- d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- g. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- h. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam Suharto (2009:132-133) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Ellis dalam Suharto (2009:133) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek finansial tetapi juga menyangkut semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsep tersebut, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

Contoh pengukuran garis kemiskinan absolut tersebut adalah yang garis kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 2.100 kalori per orang per hari dan disertai dengan pendapatan tertentu atau pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan standar pendapatan 1 dollar AS per orang per hari.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material. Kemiskinan secara luas didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan baik dalam pendidikan, kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suharto, 2009:134).

Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Departemen Sosial, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2002:3). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Departemen Sosial, 2001). Kebutuhan pokok dalam definisi tersebut meliputi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Kemiskinan ditinjau dari aspek politis dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu :

- a. bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat.
- b. bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia.
- c. bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Kemiskinan dalam konteks politik dapat didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi:

- a. modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan),
- b. sumber keuangan (pekerjaan, kredit),
- c. organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial),
- d. jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa
- e. pengetahuan dan keterampilan,;
- f. informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, 2009).

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangikan seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dimasyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri individu miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya.

Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis dalam Suharto *et.al.*, (2009), misalnya menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan tersebut, kemiskinan terjadi bukan karena “ketidakmauan” si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmauan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan orang miskin dapat bekerja.

Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997-1999. Selama kurun waktu 1976-1996 terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen namun setelah itu terjadi peningkatan jumlah orang miskin dengan tajam, terutama setelah dilanda krisis ekonomi.

Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998 meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa Organisasi internasional buruh atau *International Labour Organisation* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 1999).

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto dalam Suharto (2009:136). data BPS juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan, masing-masing menjadi 62,72% untuk wilayah pedesaan dan 61,1% untuk wilayah perkotaan. Persentase peningkatan penduduk miskin di wilayah pedesaan terhadap total populasi (7,78%) lebih besar dibandingkan dengan perkotaan (4,72%). Jumlah orang miskin selama dua tahun terakhir ini secara absolut meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa.

Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan Depsos dalam Suharto (2009:136), jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2012 mencapai 1.253.834 ribu orang (Anonimus, 2013). Persentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia, masing-masing 17,6 % dan 7,7 %. Hal tersebut berarti bahwa jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, maka sebanyak 18 orang

diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin.

2. Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Hardiman (1982) dan Jones (1990) dalam Suharto (2009:143), pekerjaan sosial di Dunia Ketiga seharusnya lebih memfokuskan pada penanganan masalah sosial yang bersifat makro, seperti kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dominan di negara-negara berkembang.

Menurut Suparlan (1985), kemiskinan yang terjadi di Indonesia secara sosiologis memiliki beberapa pola, yaitu:

a. Kemiskinan Individu

Kemiskinan individu terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang dipandang oleh seseorang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari lembah kemiskinan.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan pengertian yang disebut dengan *social economics status* atau disingkat dengan SES (biasanya untuk keluarga atau rumah tangga). Dalam hal ini diadakan perbandingan antara kekayaan materil dari keluarga atau rukun tetangga di dalam suatu komunitas teritorial.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bagiannya. Kemiskinan struktural dipahami sebagai kemiskinan yang terjadi akibat ketidakmerataan sumberdaya karena struktur dan peran seseorang dalam masyarakat.

Menurut Nasikun (1995), tiga ciri kemiskinan struktural yakni :

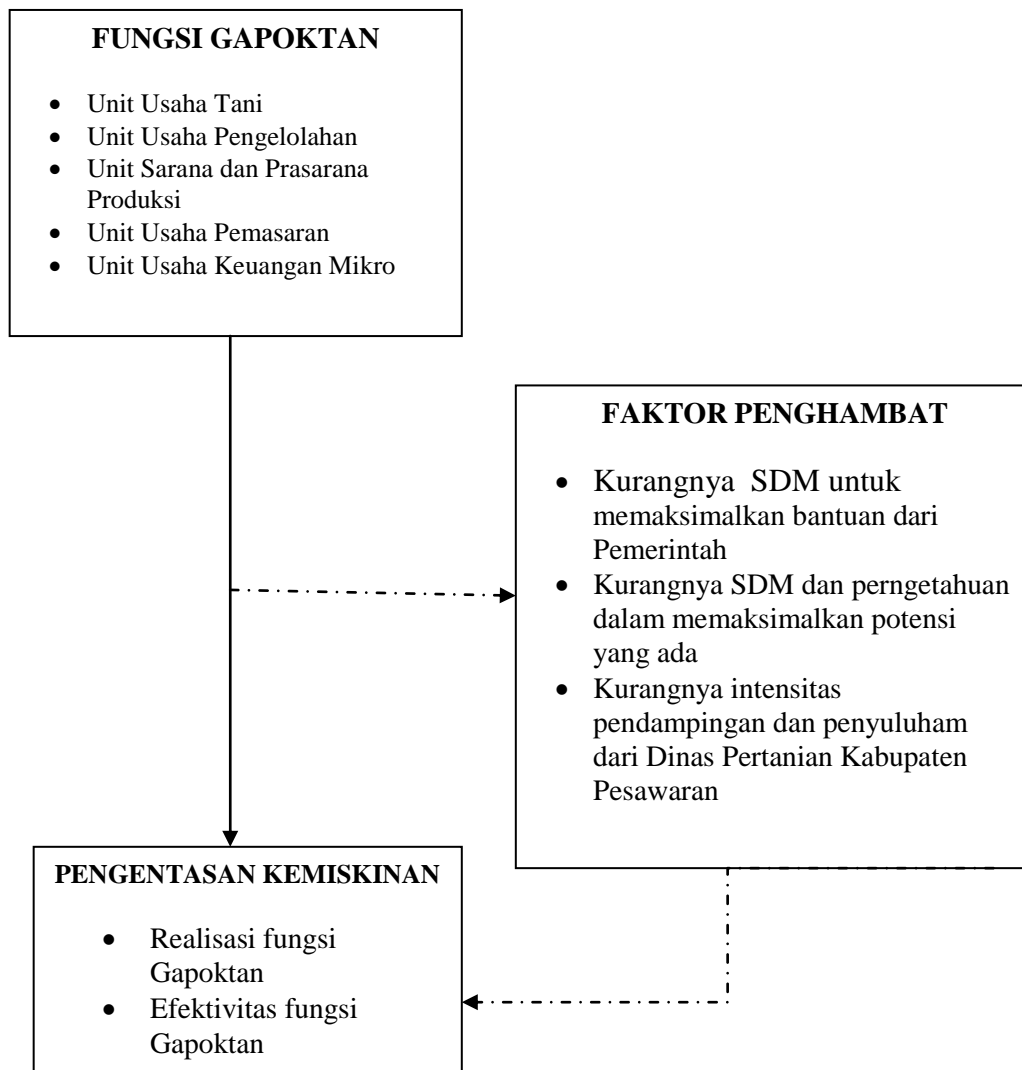
1. jauh dari alat-alat produksi,
2. jauh dari proses pengambilan keputusan,
3. terasing dari kemungkinan partisipasi.

Kemiskinan struktural menurut teori Johan Galtung (1971) adalah kelompok yang terdapat di luar "pusat" atau yang berada di "pinggiran". Hal tersebut mengindikasikan adanya dua kelas dalam suatu negara, yakni pusat dan pinggiran. Kelas pusat punya kekuasaan secara politik, sedangkan kelas pinggiran dibisukan oleh kemiskinan buatan pusat. Budiman (1996:39) memandang modernisasi didasarkan pada faktor non material penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran.

Menurut Arief (1977), kemiskinan struktural diakibatkan oleh bobroknya kinerja Pemerintah, banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga distribusi kekayaan negara yang berlimpah tidak pernah sampai dan adil kepada masyarakat kelas bawah. Kekayaan negara dikuasai oleh kalangan elit tertentu, pemerintah, aparat birokrat, dan sebagian orang kalangan menengah keatas saja, yang miskin semakin susah dan melarat sedangkan yang kaya semakin haus oleh kekayaan, dan hidupnya semakin konsumtif.

C. Skema kerangka pikir

Kerangka pikir peneliti ini terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir